

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi yang melanda kawasan asia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, telah mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami kemunduran yang serius. Kehancuran yang terjadi pada sistem perbankan dan perusahaan swasta telah mengakibatkan depresi ekonomi yang sangat besar dan perubahan politik secara mendalam, Keruntuhan ekonomi yang menimpa bangsa ini tidak bisa lepas dari adanya praktek bisnis yang kurang fair di masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu etika dan atura sebagai sebuah batasan mengenai boleh atau tidaknya suatu perbuatan itu dilakukan. Sayangnya, hal ini kurang diperhatikan selama ini, bahkan pandangan mengenai etika bisnis sendiri masih minim di Indonesia(**Media Akuntansi : 2000**).

Seperti yang telah kita ketahui bersama, krisis ekonomi yang telah terjadi di negara Indonesia dipicu oleh merosotnya nilai tukar rupiah terhadap nilai dollar ; nilai tukar terendah yang telah mencapai Rp 15.700,00 pada bulan juni tahun 1998. Merosotnya nilai tukar rupiah ini disebabkan karena membengkaknya jumlah hutang luar negeri yang telah jatuh tempo pada saat waktu yang hampir bersamaan.

Ketidakmampuan sektor swasta dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak debitor luar negeri, pada waktu itu banyak disebabkan karena pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan, yang disebabkan karena lemahnya penganggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan, yang disebabkan karena lemahnya peraturan dan perundang – undangan yang mengatur sistem pengelolaan perusahaan di Indonesia yang bertentangan dengan prinsip *Good Corporate Governance* di kalangan perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini terutama terjadi karena disebabkan oleh sangat minimnya peraturan yang jelas akan hak dan kewajiban pihak – pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan, seperti para pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, serta pihak – pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholder's*) lainnya, sehingga pengawasan akan kinerja perusahaan menjadi sangat longgar.

Tidak dilaksanakannya prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* tersebut tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis resiko akan suatu hasil, investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif, yang pada akhirnya akan menurunkan dan akan memudarkan kepercayaan yang ada pada para pemodal. Oleh karena itu, maka tuntutan terhadap paradigma *good governance* dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah *good governance* sendiri dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada masyarakat, (Wanandi, 1998).

Perwujudan *good corporate governance* merupakan suatu proses. Dari kesalahan masa lampau yang memang sulit untuk diubah. Masalah budaya dan independensi yang berkait dengan hutang budi, merupakan kendala tersendiri. Bukannya praktik bisnis yang baik di Indonesia tidak ada, yang jelas masyarakat telah merasakan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan perekonomian yang baik.

Jika kondisi *good governance* dapat dicapai maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (*clean and responsive state*), dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (*good corporate governance*) bukan merupakan impian lagi. Untuk dapat mencapai *good governance*, maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas. Kunci utama dibutuhkan *good governance* adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui mekanisme supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan juga sebagai upaya untuk memperkuat dan mempertegas pertanggungjawaban pimpinan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Upaya melakukan *good corporate governance* dapat dilakukan jika masing – masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan *good corporate governance*. Berikut setidaknya bentuk – bentuk peran yang dapat di ambil oleh para manajer, akuntan manajemen, dan auditor internal dalam mendukung terwujudnya GCG di perusahaan.

Para manajer perusahaan dapat berperan secara efektif terhadap corporate governance dengan melakukan tindakan – tindakan, antara lain :

1. Mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi, dan mengelola resiko dan peluang ;
2. Menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap;
3. Menaati standar – standar etika; dan
4. Memandang dewan direksi perusahaan sebagai ahli dan kewenangan legalnya diakui.

Akuntan manajemen dapat berperan dalam :

- 1) Memberikan sistem informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas masa depan yang disetujui dan direncanakan;
- 2) Merancang dan menerapkan sistem internal control yang berperan sebagai dewan penjamin;
- 3) Menjamin bahwa pendelegasian kewenangan ditaati; dan
- 4) Mengawasi dan mengevaluasi biaya – biaya serta manfaat – manfaat dari aktivitas utama.

Auditor internal dapat berperan dalam :

- I. Membantu dewan dalam menilai resiko utama dan memberi nasihat pada pihak manajemen;
- II. Mengevaluasi sistem internal kontrol dan bertanggung jawab kepada komite audit;

III. Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali.

**(Presiden CIMA (Chartered Institute of Management Accountant) :
David Melvill).**

Pada hakekatnya, *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana suatu korporasi untuk dioperasikan dan diawasi. Sistem ini mengatur dengan jelas dan tegasapa saja yang menjadi hak dan kewajiban pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan suatu korporasi bisnis, seperti dewan komisaris, dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan para stakeholder's lainnya. Atau secara lebih khusus, *Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham, serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder's*) seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat.

Salah satu prinsip utama dari GCG adalah akuntabilitas (*Accountability*). Akuntabilitas didefinisikan oleh Ikatan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam bukunya yang berjudul *Akuntabilitas dan Good Governance* (2002:2) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Penelitian mengenai *Good Corporate Governance* merupakan fenomena yang menarik di tengah perbincangan mengenai audit internal dewasa ini. Se jauh mana pengaruh audit internal terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* pada sektor pariwisata yang kini sedang menjadi tuntutan masyarakat luas. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi ini yaitu :
“PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan yang diidentifikasi pada penelitian ini yaitu

1. Apakah pelaksanaan audit internal pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk memadai
2. Apakah *Good Corporate Governance* (*GCG*) pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sudah terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya atau tidak.
3. Seberapa besar peranan audit internal yang memadai berperan dalam meningkatkan *GCG* pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan peran profesi audit internal dalam meningkatkan *Good Corporate Governance*. Data yang tersedia akan digunakan penulis sebagai bahan penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Unuversitas Kristen Maranatha dan memberikan gambaran tentang *Good Corporate Governance* di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk apakah sudah berjalan dengan semestinya.
3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh temuan-temuan yang bermanfaat antara lain :

1. Bagi organisasi

Untuk memberikan *feedback* dan masukan dalam hal pertanggungjawaban kinerja keuangan organisasi untuk menciptakan lembaga pemerintah yang bersih.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan dari informasi yang telah ada ini dapat mengetahui peran karyawannya terutama auditor internal dalam upaya meningkatkan *Good Corporate Governance*, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan *good corporate governance* di perusahaan.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu informasi bagi pihak – pihak yang tertarik dan peduli pada perkembangan *good corporate governance* di Indonesia.

4. Bagi Profesi Audit Internal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan langkah – langkah perubahan agar keberadaan profesi ini dapat memberikan nilai tambah bagi kebutuhan perusahaan.

5. Bagi Masyarakat dan dunia pendidikan

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Tuntutan masyarakat dewasa ini, terhadap tata kelola perusahaan yang sehat semakin tinggi, sehingga semakin selektif dalam pemilihan perusahaan. Pengertian governance dapat di artikan sebagai cara mengelolan urusan – urusan public, menurut *United National Development Program (UNDP)* yang dikutip dari **Mardiasmo (2002:17)**, mendefinisikan governance sebagai berikut :

“ The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation 's affair at all levels ”

Dari pernyataan diatas UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan Negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan keijakan (*policy/strategic formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implikasi kebijakan.

Karakteristik good corporate governance menurut UNDP, meliputi;

1. Participation ;
2. Rule of law ;
3. Transparency ;
4. Responsiveness ;
5. Consensus orientation ;
6. Equality
7. Efficiency and effectiveness
8. Accountability
9. Strategic vision
10. Independensi

Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI) yang dikutip dari **Tjager (2003:26)** mendefinisikan corporate governance sebagai :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka dengan kata lain system yang mengendalikan perusahaan.”

Good Corporate Governance (GCG) bukan hal baru di Indonesia. Kalau akhir – akhir ini jadi topik pembicaraan, itu disebabkan karena bangkitnya kesadaran corporate secara nasional untuk ikut memikul tanggung jawab dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian Indonesia. Bangkitnya kesadaran itu sendiri terjadi setelah hasil evaluasi maupun kajian dari berbagai aspek bisnis menunjukkan bahwa krisis bukan semata – mata dari efek domino (krisis Asia). Melainkan dampak bisnis yang dilakuka perusahaan di Indonesia yang tidak mengindahkan Good Corporate Governance.

Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Menurut *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* seperti yang dikutip oleh majalah **Manajemen Manusia edisi Juli 2000**, *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dijalankan dan diawasi. Struktur *corporate governance* menjelaskan pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perusahaan, seperti direksi, dewan komisaris,

manajer, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan, serta mengeluarkan peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan.

Menurut **David Melvill**, presiden *Chartered Institute of Management Accountant*, ada beberapa keuntungan dari penetapan *Good Corporate Governance*, antara lain : mengurangi resiko, membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja, membantu perusahaan dalam upaya *go public*, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan akuntabilitas sosial yang akan terungkap secara jelas. Ide pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja pada perusahaan. Dengan *Good Corporate Governance* diharapkan perusahaan dan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah praktik yang sehat di segala bidang.

Dalam mewujudkan dan meningkatkan *Good Corporate Governance* memerlukan peran akuntan perusahaan, baik peran dari akuntan manajemen maupun auditor internal. Auditor internal bertugas mengevaluasi sistem akuntansi serta menilai seberapa jauh kebijakan dan program kinerja manajemen yang diperlukan. Auditor internal merupakan salah satu profesi yang menunjang peningkatan *Good Corporate Governance*, saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan secara sehat.

Definisi audit internal yang disetujui oleh **IIA Board of Directors** pada bulan juni 1999. Definisi baru audit internal tidak hanya merefleksikan perubahan yang terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga mengarahkan auditor internal menuju peran yang lebih luas dan mampu berpengaruh pada masa yang akan datang, dikutip dari **Tunggal (2000:3)** definisi baru tersebut adalah :

“Internal audit is an independent, objective assurance and consulting activities designed to add value and improve an organization’s operations. It help an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Definisi diatas dapat diartikan bahwa audit internal adalah aktivitas yang independent, objektif, dan aktivitas pemberi keyakinan yang memadai dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi. Audit internal juga dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengarturan dan pengelolaan organisasi.

Agar terciptanya Audit Internal (pemeriksaan intern) yang baik, maka perlu dipenuhi suatu kriteria atau standar. Salah satu standar yang digunakan adalah *Standards fot the Professional Practice of Internal Auditing* yang dikeluarkan oleh **The Institute of Internal Auditors** sebagai berikut :

1. *Independence* (Independensi)

Independensi harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya dan memiliki sikap mental yang

objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*). Audit Internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.

2. *Professional Proficiency* (Kemampuan Profesional)

Audit Internal harus dilakukan dengan keahlian dan ketelitian profesional.

3. *Scope of Work* (Lingkup Kerja)

Lingkup pekerjaan auditor internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

4. *Performance of Audit Work* (Pelaksanaan Kegiatan Audit)

Kegiatan audit harus meliputi perencanaan audit (*Audit Program*), pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil (*Reporting*), dan menindaklanjuti (*Following Up*).

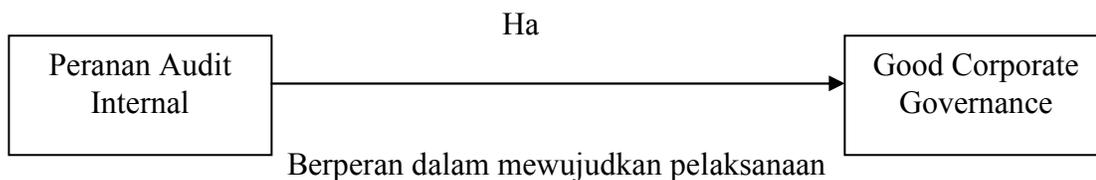
5. *Management of The Internal Auditing Departement* (Manajemen Bagian Audit Internal)

Pimpinan Audit Internal harus mengelola bagian Audit Internal secara tepat.

Perwujudan *Good Corporate Governance* ternyata sangat membutuhkan peran akuntan perusahaan, salah satunya adalah yang bekerja sebagai Auditor Internal. Peran Auditor Internal yang meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi, disamping menilai seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan. Perwujudan *Good Corporate Governance* yang efektif menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan pengendalian perusahaan sehingga dapat

ditekan seminimal mungkin peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :



Gambar 1.1 : Hubungan Antara Peranan Audit Internal dalam Mewujudkan Pelaksanaan Good Corporate Governance

$H_0 : \rho = 0$, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara peranan kinerja audit internal dalam mewujudkan pelaksanaan good corporate governance.

$H_a : \rho \neq 0$, artinya ada hubungan yang signifikan antara peranan kinerja audit internal dalam mewujudkan pelaksanaan good corporate governance.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan dan penelitian data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis dengan pendekatan studi kasus, dimana data yang diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari. Menurut **Nazir (1999:63)**, metode deskriptif adalah metode dalam penelitian sekelompok manusia,

suatu obyek suatu kondisi, suatu sistem penilaian ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dimana tujuannya adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode ini bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Untuk keperluan pengujian diperlukan serangkaian langkah-langkah yang akan dimulai dengan teknik pengumpulan data dan rancangan pengujian hipotesis dengan cara pengisian kuesioner atau daftar pertanyaan terstruktur dari masing – masing bagian yang terkait.

Untuk mendapatkan data primer, teknik penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan pimpinan, staf dan karyawan tertentu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain data primer, sumber data sekunder juga diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini penulis mengadakan penelitian di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang berlokasi di Jl. Japati no. 1 Bandung. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2007 sampai dengan selesai.